

# PROBLEMATIKA PENERAPAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) DI MADRASAH

Dede Rosyada\* dan Wahdi Sayuthi\*\*

## **Abstract**

*KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) is a national policy which has been socialized into madrasahs. Development of KTSP is carried out by adopting a Content Standard issued by Department of National Education (Departemen Pendidikan Nasional/ Depdiknas), so that it needs a creativity, integrity, and professionalism of teachers and the management of madrasahs to construct the curriculum. The implementation of KTSP development at madrasahs is assumed will be experiencing some problems, many others, for example: (1) principals of madrasahs should motivate teachers to develop the classroom curriculum, while he himself is not experienced with doing so; (2) professionalism of the teachers of madrasahs; (3) the facilities and infrastructures of madrasahs which are limited; and (4) teachers of madrasahs still have not been familiar with the learning models that encourage the activities of*

---

\* Guru Besar Bidang Penelitian Pendidikan dan Dekan pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;  
\*\* Asisten Bidang Ilmu Pendidikan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

*students in classrooms. Various parties, especially those are responsible for increasing educational quality of the madrasahs, need to deal with the abovementioned issues in a serious manner.*

**Keywords:** *KTSP, content standard, madrasahs*

## PENDAHULUAN

Perubahan kurikulum dalam sebuah negara sesungguhnya merupakan sebuah keniscayaan, sebagai bagian dari proses penyempurnaan dan peningkatan mutu pendidikan. Dalam konteks ini, Indonesia—sejak lepas dari jajahan Belanda dan Jepang—sudah beberapa kali melakukan perubahan kurikulum, yakni sekitar 6 (enam) kali perubahan. Ironisnya, perubahan kurikulum di Indonesia seringkali tidak dibarengi dengan sosialisasi secara menyeluruh kepada pelaksana pendidikan (sekolah dan madrasah), sehingga yang sering kali terjadi adalah “ketidakpahaman dan ketidaksiapan” para penyelenggara pendidikan di sekolah dan madrasah dalam mengimplementasikan perubahan kurikulum tersebut.

Sebut saja misalnya kasus kebijakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004 yang kemudian dianggap kurang sukses dalam implementasi di lapangan karena persoalan tidak menyeluruhnya informasi yang

diterima oleh penyelenggara proses pendidikan di tingkat sekolah dan madrasah. Bahkan beberapa ahli menilai bahwa KBK 2004 tidak banyak digunakan oleh sekolah atau madrasah karena persoalan minimnya informasi dan *skill* penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan madrasah dalam mengimplementasikan KBK 2004 tersebut. Sampai kemudian muncul kebijakan baru tahun 2006 dengan lahirnya model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang dikembangkan dari KBK tahun 2004. Kebijakan ini mengundang kontroversi di tengah masyarakat dan dinilai oleh berbagai kalangan sebagai suatu bentuk “kebingungan” pemerintah dalam menata sistem pendidikan, dan Pemerintah dianggap tidak memiliki visi yang jelas terhadap arah pendidikan di Indonesia ([www.dewo.wordpress.com/2006/03/01/kurikulum-baru-2006](http://www.dewo.wordpress.com/2006/03/01/kurikulum-baru-2006)).

Terlepas dari kritik dan komentar tersebut, KTSP kini sudah menjadi kebijakan nasional dan telah disosialisasikan pada sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia, dan sudah menjadi komitmen nasional untuk diimplementasikan secara menyeluruh di semua jenjang pendidikan formal di seluruh wilayah tanah air. Secara konseptual, yang dimaksud dengan KTSP adalah kuri-

kulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Pengembangan KTSP ini dilakukan dengan mengadaptasi sepenuhnya Standar Isi yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional melalui Permendiknas No. 22 tahun 2006, serta Standar Kompetensi Lulusan yang dikeluarkan melalui Permendiknas No. 23 tahun 2006. Akan tetapi, untuk Penetapan KTSP-nya setiap sekolah boleh menambah tawaran pelajaran pada para siswanya sesuai dengan permintaan para pelanggan dan pemakai lulusan sekolah/madrasah, dengan tetap memperhatikan aspek psikologi khususnya dalam konteks kesiapan dan kemampuan mereka belajar.

Standar Isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu, antara lain; Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar isi ini secara operasional ditetapkan oleh Kepmendiknas No. 22 Tahun 2006. Sementara, yang dimaksud dengan Standar Kompetensi Lulusan merupakan kualifikasi

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagaimana yang ditetapkan dalam Kepmendiknas No. 23 Tahun 2006.

Dengan demikian, KTSP menuntut kratifitas dan integritas profesional tim guru dan manajemen sekolah/madrasah untuk bisa secara optimal memahami Kompetensi Standar dan Kompetensi dasar yang dimintakan Departemen pendidikan Nasional untuk bisa diserap secara optimal oleh setiap satuan pendidikan, serta permintaan-permintaan dari para pelanggan dan pemakai sekolah, yang bisa saja meminta kompetensi di luar yang telah diminta oleh pemerintah. Khusus untuk madrasah, berbagai tagihan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hasil belajar siswa dengan indikator kompetensi pada matematika, sains, dan bahasa, bisa tidak dianggap cukup oleh masyarakat sebagai pelanggan madrasah, mereka meminta indikator-indikator kompetensi lain dalam aspek integritas keberagamaan dan moralitas sosial.

Bersamaan dengan itu, KTSP juga menuntut dengan serius profesionalisme guru serta dukungan manajemen sekolah, yang keduanya sangat terkait erat dalam mengkonstruksi, mengimplementasi dan mengevaluasi kurikulum. Implementasi kurikulum menuntut integritas dan konsistensi

para guru dalam melaksanakan tugas-tugas profesinya, dan bahkan mereka juga dituntut untuk terus secara dinamis melakukan eksplorasi keilmuaan yang mereka tekuni, sehingga bisa memenuhi tagihan-tagihan kurikulum serta dapat memberikan layanan pembelajaran yang baik untuk para siswanya. Meningkatnya madrasah dalam sistem pendidikan nasional yang secara legal berada dalam posisi yang sama dengan sekolah umum, menuntut layanan yang sama terhadap para siswanya, baik dalam konteks pengembangan maupun implementasi KTSP-nya. Oleh sebab itu, muncul pertanyaan, problem apa yang dihadapi oleh madrasah formal dalam mengimplementasikan KTSP sebagai sebuah kebijakan nasional dalam pendidikan.

### **Sekilas tentang Kurikulum dalam Pendidikan**

Kurikulum merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pendidikan, walaupun unsur guru sebagai pendidik dengan berbagai tugas profesionalnya sering dipandang jauh lebih penting. Akan tetapi, gambaran arah layanan pendidikan yang diberikan sekolah pada para pelanggan utamanya, terlihat dalam dokumen kurikulum. Struktur mata pelajaran

yang akan dibelajarkan pada para siswa juga tergambar dalam dokumen kurikulum, bahkan sekwensi bahan ajar yang akan dipelajari siswa juga terlihat dalam dokumen tersebut. Demikian pula dengan *school culture* yang mempengaruhi perubahan-perubahan sikap dan perilaku siswa, kode etik siswa, tata tertib sekolah, serta berbagai pola hubungan antar warga sekolah, menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam proses pembentukan sikap dan karakter siswa. Jika kurikulum diartikan secara holistik, maka kurikulum bukan sesuatu yang sederhana. Kurikulum bukan sekedar *course out line*, kurikulum juga bukan sekedar rangkaian *list of subjects*, tapi kurikulum adalah keseluruhan. Ronald C Doll menegaskan bahwa kurikulum adalah seluruh pengalaman yang ditawarkan pada anak-anak peserta didik di bawah arahan dan bimbingan sekolah (Doll, 1964: 15) Sejalan dengan itu, Keneth T Henson mengidentifikasi pengertian kurikulum yang mewacana dalam diskurus akademik, antara lain menurutnya, kurikulum adalah (Henson, 1995: 6):

1. Sesuatu yang akan dibelajarkan di sekolah;
2. Struktur mata pelajaran;
3. Bahan yang akan dipelajari oleh siswa;

4. Program-program belajar
5. Sekwensi bahan-bahan ajar
6. Gambaran tentang citra hasil proses studi;
7. Rangkaian mata pelajaran dan bahan ajar yang akan dipelajari siswa;
8. Segala sesuatu yang terjadi di sekolah, termasuk di dalamnya kegiatan ekstra kurikuler, bimbingan dan konseling, dan pola hubungan interpersonal antar siswa, siswa dengan guru, siswa dengan tata usaha dan antar seluruh warga sekolah;
9. Segala sesuatu yang dibelajarkan pada siswa, dalam kelas atau di luar kelas;
10. Segala macam pengalaman siswa sebagai hasil dari proses mereka sekolah.

Pada akhirnya, walaupun beberapa pengertian masih menuju pada kurikulum tertulis, Kenneth T Henson memahami kurikulum secara holistik, yakni kurikulum tertulis (*the written curriculum*) yang lazim menjadi bahan kurikulum terdokumentasi, serta kurikulum terselubung (*the hidden curriculum*), yang menjadi program sekolah dalam rangka pengembangan aktifitas siswa, tapi tidak tertulis dalam dokumen kurikulum, dan justru tertuang dalam dokumen lain, seperti kode etik siswa, tata tertib sekolah, dan lainnya.

Kurikulum tertulis, sesuai dengan yang sudah distandarisasi dalam regulasi pendidikan di Indonesia, mencakup tujuan, isi, rangkain topik bahan ajar, serta strategi pembelajaran yang relevan dengan tujuan tersebut. Oleh sebab itu, kurikulum mencakup konsep atau konstruksi bahan yang akan dibelajarkan sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa, disain membelajarkan siswa untuk bahan-bahan ajar tersebut, serta mengukur pencapaian kompetensi mereka setelah selesai program pembelajaran. Kurikulum tertulis memiliki posisi sangat signifikan, karena kenaikan kelas atau tinggal kelas, pada umumnya ditetapkan oleh pencapaian kompetensi sebagaimana tertuang dalam kurikulum tertulis. Demikian pula dengan hasil ujian akhir sekolah, apakah mereka lulus atau tidak sangat tergantung dari hasil ujian tulis yang dikembangkan dari kurikulum tertulis. Kendati diakui memiliki pengaruh positif terhadap perubahan sikap dan prilaku siswa, kurikulum terselubung sering tidak dikontrol oleh manajemen sekolah, bahkan tidak ada pengukuran perubahan sikap dan prilaku sebagai hasil dari kurikulum terselubung (*the hidden curriculum*)

Secara teoretik, Allan Glatthorn mendefinisikan bahwa *The Hidden*

*Curriculum* (kurikulum terselubung), adalah kurikulum yang tidak menjadi bagian untuk dipelajari, yang secara lebih definitif digambarkan sebagai berbagai aspek dari sekolah di luar kurikulum yang dipelajari, namun mampu memberikan pengaruh perubahan nilai, persepsi dan perilaku siswa (Glatthorn, 1987: 20). Kebiasaan sekolah menerapkan disiplin terhadap siswanya, seperti ketepatan guru memulai pelajaran, kemampuan dan cara-cara guru menguasai kelas, kebiasaan guru memperlakukan mereka yang melakukan kenakalan di dalam kelas, semuanya itu merupakan pengalaman-pengalaman yang dapat mengubah cara berfikir dan perilaku siswa. Demikian pula dengan lingkungan sekolah yang teratur, rapi, tertib dan mampu menjaga lingkungan yang bersih serta asri, merupakan pengalaman yang dapat mempengaruhi kultur siswa. Itulah intinya *hidden curriculum* sebagaimana dikemukakan di atas.

Glatthorn mengangkat *hidden curriculum*, sebagai formulasi lain tentang berbagai pengalaman yang ditawarkan sekolah pada siswa di luar pembelajaran dalam kelas, dan memiliki kontribusi signifikan terhadap berbagai perubahan perilaku siswa, dalam konotasi perilaku yang lebih luas. Oleh sebab itu, rencana perlakuan siswa di luar kelas tersebut harus

sejalan dengan rencana pembelajaran formal dalam kelas, sehingga tidak terjadi kontradiksi yang kontra produktif terhadap hasil pendidikan.

Bersamaan dengan itu, Allan A Glatthorn juga menjelaskan tiga variabel penting dalam pengelolaan dan pengembangan sekolah, dan menjadi bagian integral dari *hidden curriculum* (Glatthorn, 1987: 22), yaitu:

1. Variabel organisasi; yakni kebijakan penugasan guru dan pengelompokan siswa untuk proses pembelajaran, yang dalam konteks ini ada empat isu yang pantas menjadi perhatian, yakni *team teaching*, kebijakan promosi (kenaikan kelas), pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan, dan pemokusan kurikulum. *Team teaching* merupakan salah satu kebijakan dalam penugasan guru (dengan pemberian tugas pada beberapa orang guru dalam satu mata pelajaran tertentu dalam kelas yang sama). Kendati belum terbukti bahwa hasil belajar siswa dengan *team teaching* itu lebih baik, namun kebijakan ini rasional dan dapat diterima, karena akan memberikan pelayanan akademik terbaik untuk siswa, dan guru mengajarkan dalam pokok-pokok bahasan yang benar-benar menjadi keahliannya. Kemudian

kebijakan dalam promosi (kenaikan kelas) untuk siswa, sekolah bisa menerapkan kebijakan promosi didasarkan pada pencapaian individual siswa, namun kebijakan tersebut belum terbukti lebih baik dilihat dari *outcome* pendidikan yang diharapkan, tapi justru promosi didasarkan pada indikator-indikator sosial, seperti sikap siswa terhadap sekolah, *self image* yang baik merupakan bagian-bagian penting dalam perubahan perilaku, di samping pencapaian prestasi akademik itu sendiri. Kemudian, pengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan juga tidak memiliki perbedaan-perbedaan hasil yang signifikan daripada pengelompokkan secara acak, walaupun ada indikasi mereka yang dikelompokkan dalam tingkat kemampuan dan talenta yang sama, memiliki efek positif terhadap sikap mereka pada pelajaran yang diajarkan. Demikian pula efeknya terhadap sekolah itu sendiri, dan juga konsep diri mereka, walaupun perbedaannya tidak signifikan. Sedangkan pemokus kurikulum sebagai implikasi dari pengelompokkan berdasarkan kemampuan dan kecenderungan, masih meru-

pakan sesuatu yang problematik, karena siswa yang berdasarkan temuan konselor memiliki talenta dan kemampuan tertentu, belum tentu menjadi besar dalam karir profesional sesuai dengan temuan konselor tersebut. Kendati pun demikian, pemokus kurikulum tetap menjadi bagian penting, karena kelompok dengan tingkat kemampuan tinggi akan menuntut perlakuan yang lebih intensif daripada kelompok dengan kemampuan di bawahnya.

2. Variabel sistem sosial; yakni suasana sekolah yang tergambarkan dari pola-pola hubungan semua komponen sekolah. Banyak faktor sistem sosial di sekolah yang dapat membentuk sikap dan perilaku siswa, yakni pola hubungan guru dengan tenaga administrasi, keterlibatan kepala sekolah dalam pembelajaran, keterlibatan guru dalam proses pengambilan keputusan, hubungan yang baik antar sesama guru, hubungan guru dengan siswa, interaksi guru dengan siswa, keterlibatan siswa dalam proses pengambilan keputusan, dan keterbukaan kesempatan bagi siswa untuk melakukan berbagai aktifitas, yang semuanya ini sangat dipengaruhi oleh efektifitas kepemimpinan sekolah.

3. Variabel budaya; yakni dimensi sosial yang terkait dengan sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan struktur kognitif. Berbagai faktor yang terkait dengan variabel kultur dan menjadi bagian penting dalam *hidden curriculum* tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Rumusan tujuan sekolah yang jelas dan dapat difahami oleh semua unsurnya sebagai hasil konsensus antara pengelola administrasi dan guru.
- b. Pengelola administrasi memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap guru dan begitu juga sebaliknya, guru memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap tenaga administrasi.
- c. Pengelola administrasi dan guru memiliki ekspektasi yang baik terhadap para siswa yang diartikulasikan dengan penguatan pelayanan akademik pada mereka.
- d. Pemberian hadiah terhadap mereka yang mencapai prestasi terbaik, dan pemberian hadiah serta hukuman yang dilakukan secara fair dan konsisten kepada para siswa.

Terjadi perbedaan dalam memposisikan keduanya di kalangan praktisi pendidikan. Ada sekolah-sekolah yang tetap menganggap

penting *hidden curriculum*, sehingga kriteria kelulusan atau kenaikan kelas, bukan ditentukan oleh skor pencapaian kompetensi pada matematika, sains, bahasa dan lainnya, tapi justru pada perubahan prilaku sosial, dan bahkan kebanggaan mereka pada sekolahnya. Namun pada umumnya sekolah-sekolah di dunia menganggap penting kurikulum tertulis, sehingga kriteria kelulusan dan kenaikan kelas menggunakan indikator-indikator kompetensi yang lebih terukur berbasis kurikulum tertulis. Termasuk di Indonesia yang kriteria kelulusannya menggunakan ukuran-ukuran hasil tes dari hasil ujian nasional, ujian akhir sekolah dan ujian mata pelajaran yang dilakukan oleh guru. Semuanya berbasis hasil tes, dan tidak banyak menggunakan hasil pengamatan guru terhadap perubahan-perubahan sikap dan prilaku siswa di sekolah/madrasah.

Terkait dengan itu semua, maka teorisasi konstruksi dan implementasi kurikulum, selalu terkait dengan lima (5) aspek, yakni filosofi sekolah yang akan mendasari perumusan tujuan sekolah, perumusan kompetensi hasil belajar dan isi bahan ajar, guru, pembelajaran dan manajemen sekolah (Wiles-Bondi, 1989: 12). Dari lima aspek di atas, nampaknya hanya ranah filosofi yang lebih eternal, konstan dan tidak banyak perubahan, semen-

tara lainnya senantiasa mengalami perubahan dan kemajuan, yang karenanya pula kurikulum harus terus dievaluasi dan dikembangkan. Perumusan filsafat pendidikan pada hakikatnya adalah menjawab tiga pertanyaan, yaitu *what is good?*, *what is true?*, dan *what is real?*, atau pertanyaan tentang aksiologi, epistemologi dan ontologi (Wiles-Bondi, 1989: 46). Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak sederhana, baik dalam konteks merumuskan jawaban-jawabannya maupun mengimplementasikan jawaban tersebut dalam aktifitas pendidikan, yakni penyusunan kurikulum dan pelaksanaan proses pembelajaran. Sebelum kurikulum disusun, pertanyaan-pertanyaan tentang kenapa sekolah ini ada, apa yang akan diajarkan, apa peran guru dan siswa, bagaimana sekolah memperhatikan berbagai perubahan, semuanya harus mampu dijawab dalam konteks penyusunan kurikulum.

Kemudian, bersamaan dengan Wiles dan Bondi, Allan A Glathorn menegaskan bahwa fokus pengembangan kurikulum harus meliputi tiga aspek, yakni konstruksi, implementasi dan evaluasi kurikulum. Konstruksi kurikulum merupakan salah satu *step* dalam proses perumusan dan pengembangan kurikulum yang sangat kompleks. Menurut Allan A Glathorn

(1999:9), pengembangan kurikulum melibatkan berbagai unsur masyarakat secara hirarkis, yakni:

1. Kelompok Kerja Sekolah;
2. Penasihat Kurikulum;
3. Pengawas Sekolah;
4. Kepala Sekolah;
5. Tim Pengembangan Kurikulum Sekolah;
6. Tim Perencana Pembelajaran;

Proses kerja yang dilakukan oleh berbagai unsur dalam hirarki ini baru akan menghasilkan struktur kurikulum yang memberikan kejelasan-kejelasan konseptual tentang performa hasil belajar siswa, berbagai materi peajaran yang akan ditawarkan pada para siswa, serta strategi yang digunakan dan alat mengukur pencapaian kompetensi hasil belajar. Dokumen kurikulum hasil kerja tim tersebut belum menjangkau kurikulum kelas yang akan digunakan guru. Kurikulum kelas tersebut yang lazim disebut sebagai silabus, menurut Allan A Glathorn dikembangkan oleh guru mata pelajaran, guru kelas, atau konsorsium mata pelajaran dan guru kelas. Silabus tersebut dikembangkan berbasis subjek mata ajar berikut tagihan-tagihan yang diminta oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah (Glathorn, 1994: 95), Kurikulum kelas harus mampu menggambarkan program pembelajaran untuk jangka waktu satu

tahun, dan mendeskripsikan topik-topik yang akan dipelajari siswa.

Untuk mengembangkan kurikulum kelas yang berkualitas, Andrew McMohan mengemukakan tujuh (7) kriteria yang harus dipenuhi (McMohan: 2002: 4), yakni:

1. Mempersiapkan alat untuk meng-*asses* kemauan dan minat siswa, kebiasaan belajar siswa, dan arah yang telah diperoleh oleh proses belajar sebelumnya.
2. Mempersiapkan alat atau instrumen yang dapat meng-*asses* kemampuan siswa dari proses pembelajaran sebelumnya
3. Rumusan hasil belajar dengan menjelaskan kompetensi-kompetensi *pre-requisit*
4. Merumuskan citra hasil belajar
5. Saran penggunaan dan pengembangan strategi pembelajaran
6. Saran pengembangan model evaluasi
7. Saran pengembangan sumber belajar

### **Pengembangan KTSP**

Dinamika kajian dan regulasi pendidikan di Indonesia sangat kuat, dan memperoleh perhatian luar biasa pada awal abad ke-21 ini. Berbagai teori kurikulum dan pembelajaran kini sudah dilegalisasi oleh berbagai level peraturan, termasuk di dalamnya

kurikulum. Pengertian kurikulum yang kemudian direkognisi oleh regulasi pendidikan adalah sebagaimana tertuang dalam PP No. 19 Tahun 2005, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dengan demikian, bila melihat pada definisi teoretik, konsep kurikulum yang diregulasikan dalam penyelenggaraan pendidikan dibatasi hanya pada wilayah kurikulum tertulis, kurikulum yang berbentuk dokumen yang memuat, tujuan, isi, bahan ajar, dan strategi yang harus dikembangkan dalam proses pembelajaran.

Sementara KTSP sebagaimana dikemukakan dalam PP No. 19 tahun 2005 adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Dengan demikian, sangat dimungkinkan, bahwa kurikulum satu sekolah/madrasah berbeda dari sekolah/madrasah lainnya, kecuali untuk wilayah yang sudah diatur dalam Permen 22 tahun 2006, sebagai standar isi yang berlaku secara nasional. Akan tetapi, jika standar isi yang ditetapkan oleh menteri itu sudah hampir menghabiskan slot kurikulum pembelajaran dalam putaran minggu, maka

kesempatan sekolah untuk mengembangkan kurikulum sekolahnya menjadi sangat terbatas, kurang memberi ruang kreativitas sekolah. Seperti, komposisi Standar Isi untuk tingkat SMA sudah menghabiskan slot sebesar 38 jam perminggu. Jika sekolah akan memberikan layanan 8 jam sehari, dan sekolah 5 hari, maka sekolah hanya memiliki peluang sebanyak 2 jam tambahan sebagai ciri *distingtif* dari sekolahnya. Dan jika memberikan layanan 10 jam sehari dengan sekolah 5 hari, maka sekolah akan memiliki slot sebesar 12 jam perminggu sebagai kurikulum *distingti* sekolahnya.

Kemudian dari itu, selain harus memenuhi Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan yang dikembangkan oleh BSNP, dan ditetapkan melalui Permendiknas No. 22 tahun 2006, setiap sekolah diberi peluang untuk mengembangkan mata ajar dan bahan ajar sesuai permintaan *stakeholder* sekolah/madrasah, yang sekaligus bisa dijadikan *benchmark* bagi sekolah/madrasah itu. Dalam kebijakan kurikulum di Indonesia, mata ajar tersebut adalah muatan lokal, yakni kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelaja-

ran yang ada. Substansi mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan.

Muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang terdapat pada Standar Isi di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Keberadaan mata pelajaran muatan lokal merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang tidak terpusat, sebagai upaya agar penyelenggaraan pendidikan di masing-masing daerah lebih meningkat relevansinya terhadap keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional sehingga keberadaan kurikulum muatan lokal mendukung dan melengkapi kurikulum nasional.

Dalam pengembangan KTSP tersebut, para penyelenggara pendidikan di madrasah harus memperhatikan beberapa prinsip fundamental, yakni:

- Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.
- Beragam dan terpadu
- Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- Relevan dengan kebutuhan kehidupan

- Menyeluruh dan berkesinambungan
- Belajar sepanjang hayat
- Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

Bagi sekolah atau madrasah yang sebelumnya telah mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi (KBK), mungkin akan terasa lebih mudah beradaptasi dengan model KTSP ini. Apalagi jika para pelaksana pendidikan di sekolah dan madrasah sudah terbiasa dengan mengembangkan indikator-indikator pembelajaran dari sejumlah indikator yang tertuang dalam KBK dan menyusun langkah-langkah pembelajaran sesuai kondisi kelas. Namun demikian, untuk mengukur sulit atau mudahnya adaptasi sekolah/madrasah terhadap KTSP, sangat tergantung pada kesiapan sekolah/madrasah itu sendiri, terutama berkaitan dengan SDM yang menyelenggarakan proses pendidikan di sekolah/madrasah.

Dalam konteks ini, BSNP memberikan rambu-rambu yang perlu diperhatikan oleh sekolah/madrasah dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan, yakni (BSNP; 2006)

### 1. Analisis Konteks

- a). Mengidentifikasi Standar Isi dan Standar Kompetensi

Lulusan sebagai acuan dalam penyusunan KTSP.

- b). Menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan yang meliputi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan program-program.
- c). Menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar: komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan sosial budaya.

### 2. Mekanisme Penyusunan

- a). Tim penyusun KTSP pada SD, SMP, SMA dan SMK terdiri atas guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Di dalam kegiatan, tim penyusun melibatkan komite sekolah, dan nara sumber, serta pihak lain yang terkait. Di Supervisi dilakukan oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tingkat kabupaten/kota untuk SD dan SMP dan tingkat provinsi untuk SMA dan SMK.

- b). Tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan MI, MTs, MA dan MAK terdiri atas guru, konselor, dan kepala madrasah sebagai ketua merangkap anggota. Di dalam kegiatan tim penyusun melibatkan komite sekolah, dan nara sumber, serta pihak lain yang terkait. Supervisi dilakukan oleh departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama.
- c). Tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan khusus (SDLB, SMPLB, dan SMALB) terdiri atas guru, konselor, kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Di dalam kegiatan tim penyusun melibatkan komite sekolah, dan nara sumber, serta pihak lain yang terkait. Supervisi dilakukan oleh dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
- d). Penyusunan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah/madrasah. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja dan/atau lokakarya sekolah/madrasah dan/atau kelompok sekolah/madrasah yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun pelajaran baru.
- e). Tahap kegiatan penyusunan KTSP secara garis besar meliputi: penyiapan dan penyusunan draf, reviu dan revisi, serta finalisasi, pemantapan dan penilaian. Langkah yang lebih rinci dari masing-masing kegiatan diatur dan diselenggarakan oleh tim penyusun.
- f). Dokumen KTSP pada SD, SMP, SMA, dan SMK dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah setelah mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui oleh dinas tingkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD dan SMP, dan tingkat propinsi untuk SMA dan SMK
- g). Dokumen KTSP pada MI, MTs, MA, dan MAK dinyatakan berlaku oleh kepala madrasah setelah mendapat pertimbangan dari komite madrasah dan diketahui oleh departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama.

- h). Dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan SDLB, SMPLB, dan SMALB dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah serta mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Spirit yang terkandung dalam kebijakan dan penerapan KTSP ini adalah model pembelajaran yang harus dipusatkan pada siswa (*student centre learning*), yakni menjadikan siswa sebagai subyek belajar bukan obyek, dan guru memposisikan diri sebagai fasilitator. Dengan kata lain, KTSP meniscayakan terjadinya proses pembelajaran yang berorientasi pada membelajarkan bagaimana siswa belajar (*learning how to learn*). Kegiatan ini sangat mungkin dilakukan jika sekolah/madrasah mampu menerapkan prinsip dan langkah-langkah operasional dalam penyusunan KTSP.

### **Madrasah dan Penerapan KTSP**

Sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional, madrasah dituntut untuk menggunakan sistem pendidikan yang diterapkan di sekolah, termasuk di dalamnya penerapan dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). Penerapan dan pengembangan KTSP di tingkat

madrasah bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah dan tanpa masalah. Bila merujuk pada teori Wiles-Bondi di atas, setidaknya terdapat beberapa problem yang dihadapi madrasah dalam konteks penerapan dan pengembangan KTSP ini, antara lain berkenaan dengan aspek manajemen pengelolaan pendidikan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan pada aspek proses pembelajaran.

#### **1. Aspek manajemen (pengelolaan) pendidikan**

Seorang kepala madrasah adalah seorang manajer. Apa pun latar belakangnya, pada saat seseorang menjadi kepala sekolah, dia harus berperan menjadi manajer, yakni menjadi seseorang yang memiliki profesional skill dan manajerial skill. Untuk bisa menjadi seorang profesional, seorang kepala madrasah harus menguasai teori-teori kurikulum dan pengembangan kurikulum, pengembangan strategi pembelajaran, serta pengembangan berbagai model, pendekatan dan teknik-teknik evaluasi, sehingga bisa mengorganisir para guru untuk melaksanakan tugas-tugas profesinya dengan baik. Kemudian, kepala madrasah juga harus memiliki manajerial skill, yakni harus mampu merumuskan dan mengem-

bangkan visi serta misi sekolah, membuat perencanaan sekolah, mengorganisasir SDM sekolah untuk bekerja, mengimplementasikan program-program sekolah, serta mengevaluasi pencapaian program-programnya. Problem manajerial dalam soal pengembangan KTSP adalah, pada aspek memotivasi para guru untuk mengembangkan kurikulum kelas, karena sampai sekarang belum banyak guru mata pelajaran atau guru kelas yang melakukan *Entry Level Assessment* (ELA) untuk menyusun silabus mata pelajaran atau kelasnya. Dan kenyataan tersebut bisa semakin parah, jika kepala madrasah sendiri belum punya pengalaman untuk melakukan hal serupa.

## 2. Sumber daya pendidik

Aspek sumber daya pendidik, dalam hal ini adalah guru manusia pendidikan dalam konteks penerapan KTSP merupakan sebuah keniscayaan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat sekolah. Dalam konteks ini, SDM guru madrasah masih banyak yang terkendala untuk mengembangkan KTSP, khususnya dalam konteks pengembangan silabus mata pelajaran yang menjadi tanggung

jawab mereka. Persoalannya diilatarbelakangi oleh dua aspek besar, yakni pertama, profesionalisme mereka yang belum secara ideal mereka penuhi sebagai kualifikasi minimal seorang guru, kemudian kedua, mereka juga sering dihadapkan pada persoalan suasana kerja yang kurang kondusif, karena *rewards* yang belum fair antar sesama guru dengan lingkungan kerja yang berbeda.

## 3. Sarana pembelajaran

Implementasi KTSP menuntut pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, serta berbasis prinsip *mastery learning*. Untuk itu, kelas harus didukung oleh sumber belajar yang tidak semata pada guru, tapi juga modul, buku-buku teks, lembar tugas, lembar tes, dan yang paling penting adalah akses pada sumber belajar dalam bentuk CD dengan komputernya. Hampir belum ada, atau setidaknya belum banyak madrasah yang menyediakan sumber-sumber belajar tersebut di kelas, dan masih lebih banyak guru menjadi penceramah di depan anak-anak muridnya, sehingga sumber belajarnya hanya guru.

#### 4. Aspek proses pembelajaran

Proses pembelajaran dalam konteks penerapan KTSP menuntut adanya pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dijabarkan dalam pencapaian indikator-indikator pembelajaran. Pencapaian SKL tersebut harus dilakukan dalam suatu proses pembelajaran yang menyenangkan (*joyful learning*) dan berorientasi pada aktivitas siswa di kelas (*student centre learning*). Untuk mendorong aktivitas siswa di kelas ini, guru memerlukan pengetahuan dan skill yang cukup dalam mendesain dan mengelola kelas. Dalam konteks ini, guru di madrasah masih belum terbiasa dengan model-model pembelajaran yang mendorong aktivitas siswa di kelas, apalagi memperhatikan persoalan pencapaian standar kompetensi lulusan. Kebiasaan proses pembelajaran yang dilakukan dengan model “ceramah” perlu mendapatkan perhatian yang serius, jika madrasah mau menerapkan KTSP.

### PENUTUP

Perubahan kurikulum model KBK menjadi model kurikulum KTSP ini sesungguhnya perlu disikapi sebagai ikhtiar positif dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di

Indonesia, karena bagaimanapun, perubahan kurikulum ini membawa implikasi positif bagi pelaksanaan pendidikan di Indonesia, termasuk madrasah. Setidaknya, ada 5 implikasi positif yang dapat diambil dari penerapan KTSP ini, yakni:

- 1) Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum menjadi dinamis dengan pemecahan masalah yang secara langsung dapat ditangani pada tingkat madrasah
- 2) Pengelolaan kurikulum sepenuhnya ditangani oleh madrasah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya
- 3) Tenaga-tenaga kependidikan yang potensial di madrasah dapat dilibatkan dalam penyusunan silabus, pelaksanaan, dan penilaiannya
- 4) Sumber-sumber daya pendidikan lainnya yang terdapat di madrasah dapat dimanfaatkan untuk penyusunan silabus
- 5) Sumber-sumber informasi lain termasuk multimedia dapat dimanfaatkan untuk memperkaya penyusunan silabus dan pelaksanaannya

Mengenai beberapa kendala madrasah dalam menerapkan dan mengembangkan model kurikulum KTSP ini, perlu disikapi secara serius oleh berbagai kalangan, terutama yang secara khusus memiliki tanggung jawab

bagi peningkatan mutu pendidikan di madrasah, yakni Departemen Agama. Dalam konteks ini, Departemen Agama perlu melakukan langkah-langkah strategis bagi pengayaan wawasan dan pengetahuan pengelola pendidikan di madrasah, misalnya dengan melakukan sosialisasi yang menyeluruh dan komprehensif terhadap penyusunan dan penerapan KTSP di madrasah, karena tanpa sosialisasi yang cukup, maka akan bisa dipastikan munculnya kerancuan dan ketidaksiapan madrasah dalam mengimplementasikan KTSP.

Curtis R Finch dan John R Crunkilton, ahli kurikulum dari *Virginia Polytechnic Institute and State University* Amerika Serikat (AS) menekankan pentingnya sosialisasi atau desiminasi sebelum kurikulum baru dijalankan. Dengan kata lain, sebelum kurikulum baru dijalankan dan diterapkan secara operasional pada level lembaga pendidikan, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah desiminasi dan sosialisasi yang efektif. Dalam konteks ini, Curtis memberikan 3 point yang perlu dipertimbangkan dalam desiminasi kurikulum baru, yakni; kesiapan pemakai dan pelaksananya (*audience*), kondisi geografis (*geographical consideration*), serta biaya penyebaran informasi (*cost*). Jika sistem desiminasi kurikulum tidak efektif,

maka sebagai apa pun materi dan tujuan kurikulum baru tersebut akan menjadi “barang baru yang mentah”, karena informasi yang diterima *audiences/users* ([www.sampoerna-foundation.org/content/view/508/48/lang.id/](http://www.sampoerna-foundation.org/content/view/508/48/lang.id/)).

Selain upaya sosialisasi dan diseminasi yang komprehensif dan efektif, pemerintah juga perlu melakukan beberapa kegiatan lain yang berorientasi pada peningkatan skill guru dan pengelola madrasah dalam mengimplementasikan KTSP di madrasah. Kegiatan-kegiatan tersebut bermuara pada peningkatan kompetensi guru dan kepala madrasah untuk mencapai 3 (tiga) kompetensi utama. **Pertama:** profesionalisme kepala madrasah sebagai manajer dalam pengelolaan pendidikan di tingkat madrasah. **Kedua,** kemampuan pengelola sekolah dalam konteks membangun jaringan kerjasama dalam memperoleh dukungan finansial dari luar madrasah. Dalam konteks ini pengelola dan pelaksana pendidikan di madrasah perlu memiliki *sense of business* sebagai upaya untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di madrasah. **Ketiga,** kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran di kelas yang diorientasikan pada keterlibatan aktif siswa di kelas. Dalam konteks ini, guru perlu

mendapatkan pengayaan dan penguatan aspek metodologis dan strategi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan yang dapat mendorong siswa untuk aktif di kelas dan belajar dengan gaya yang menyenangkan (*joyful learning*).

Untuk mencapai 3 (tiga) kompetensi minimal guru dan pengelola madrasah tersebut, maka langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan adalah:

1. *Identifikasi kesiapan madrasah.*

Mengidentifikasi kesiapan madrasah dimaksudkan untuk mendapatkan informasi empirik berkaitan dengan kesiapan madrasah dalam mengimplementasikan KTSP, yang menyangkut profesionalisme kepala madrasah, ketrampilan dan kemampuan guru dalam mengelola kelas, kesiapan sarana dan prasarana serta pembiayaan yang dimiliki oleh madrasah. Dengan identifikasi ini akan terlihat “potret” kesiapan madrasah dalam mengimplementasikan KTSP serta menjadikan “potret” tersebut sebagai bahan dalam rangka melakukan pembinaan dan membantu madrasah untuk siap menerapkan KTSP.

2. *Merencanakan kegiatan di tingkat madrasah.* Setelah identifikasi kesiapan madrasah dilakukan, maka langkah strategis berikutnya

adalah merencanakan sosialisasi, diseminasi dan peningkatan kinerja guru dan kepala madrasah dalam menerapkan KTSP di madrasah. Upaya perencanaan ini dimaksudkan untuk merumuskan target pencapaian berbagai kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan skill dan kinerja pengelola pendidikan di madrasah dalam penerapan KTSP. Dalam konteks ini, perencanaan dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kegiatan, yakni merencanakan pelaksanaan kegiatan (pelatihan, sosialisasi, dan sebagainya), melakukan pemilihan materi yang dianggap urgen dan signifikan, serta melaksanakan proses kegiatan itu sendiri.

4. *Melakukan monitoring dan evaluasi.*

Untuk melihat keberhasilan kegiatan sosialisasi, diseminasi atau pelatihan yang telah dilakukan maka kegiatan berikutnya yang perlu dilakukan adalah monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melihat dan mengukur bagaimana pengelola pendidikan di madrasah (guru dan kepala madrasah) mampu menerapkan dan mengembangkan KTSP pada proses pembelajaran di madrasah, sebagaimana yang telah mereka terima dalam proses kegiatan sebelumnya. Hasil monitoring dan

evaluasi ini akan dijadikan bahan dan landasan dalam merumuskan langkah-langkah strategis berikutnya dalam rangka memaksimalkan penerapan KTSP di madrasah.

Akhirnya, menyikapi penerapan kebijakan KTSP dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah ini, perlu disambut baik sebagai bentuk otonomisasi dan kemandirian lembaga pendidikan dalam mengelola program pendidikan dan merumuskan pencapaian kompetensi lulusannya. Berbagai kekurangan dan kendala yang dihadapi madrasah saat ini, hendaknya disikapi sebagai sebuah “tantangan” oleh pembina lembaga pendidikan madrasah untuk terus berupaya meningkatkan skill dan kinerja pengelola madrasah sehingga mereka benar-benar siap dalam menerapkan KTSP di madrasah.\*\*\*

Wa Allah A'lamu bi al-Shawab,

### SUMBER BACAAN

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) (2006): *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*, Jakarta: BSNP.

Doll, Ronald C. (1964): *Curriculum Improvement, Decision Making and Process*, Boston, Allyn and Bacon.

Glathorn, Allan A. (1995): *Developing a Quality Curriculum*. Virginia, ASCD.

Kenneth T Henson (1995): *Curriculum Development For Education Reform*. New York, Harper Collin College.

McMohan, Andrew (2002): *Curriculum development Narrative, paper on Adult High School Completion Programs*.

Peraturan Pemerintah No. 19, tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan nasional No. 22 tahun 2006, tentang Estándar Isi.

Wiles, John, and Joseph Bondi (1989): *Curriculum Development A Guide to Practice*. Columbus, Ohio, USA, Merryl Publishing Company.

[www.sampoernaoundation.org/content/view/508/48/lang,id/](http://www.sampoernaoundation.org/content/view/508/48/lang,id/)

[www.mail-archive.com/nasional\\_list-bounce@freelists.org/msg03944.html](http://www.mail-archive.com/nasional_list-bounce@freelists.org/msg03944.html)

[www.kompas.com//kompas-cetak/0609/11/humaniora/2943084.htm](http://www.kompas.com//kompas-cetak/0609/11/humaniora/2943084.htm)

[www.saifuladi.wordpress.com/2007/01/06/kurikulum-ktsp-studi-banding-ih/](http://www.saifuladi.wordpress.com/2007/01/06/kurikulum-ktsp-studi-banding-ih/)

[www.radarbanjarmasin.com/berita/index.asp?Berita=Tapin&id=56650](http://www.radarbanjarmasin.com/berita/index.asp?Berita=Tapin&id=56650)

[www.dewo.wordpress.com/2006/03/01/kurikulum-baru-2006/](http://www.dewo.wordpress.com/2006/03/01/kurikulum-baru-2006/)